

**BAB IV**

**PERAN KH. AHMAD KHAERUN PADA MASA  
REVOLUSI DI TANGERANG PADA  
TAHUN 1945-1946**

**A. Masuknya Tentara Jepang ke Wilayah Tangerang**

Akhir tahun 1939, situasi politik internasional menjadi panas akibat di Eropa meletus Perang Dunia II, setelah Jerman secara mendadak menyerang Polandia tanggal 1 September 1939. Hal itu berdampak terhadap pemerintahan Hindia Belanda, karena negara Belanda terletak di antara Jerman dan Inggris terlibat dalam perang. Tanggal 10 Mei 1940 tentara Nazi Jerman menyerbu negeri Belanda, sehingga Ratu Wilhelmina terpaksa mengungsi ke Inggris. Kejadian itu menggoncangkan pemerintah Hindia Belanda. Apalagi situasi politik di Hindia Belanda makin memanas akibat berbagai inisiatif kaum pergerakan nasional yang makin meningkat untuk menuntut kemerdekaan tanah air mereka. Situasi dan kondisi tersebut menyebabkan gubernur Jenderal Hindia Belanda Tjandra van Starkenborgh Stachouwer mengeluarkan pengumuman, bahwa sejak tanggal 10 Mei 1940, Indonesia dinyatakan dalam keadaan perang dan

partai-partai politik dilarang menyelenggarakan rapat. Pemerintah Hindia Belanda makin goncang dan cemas, karena pada tanggal 8 Desember 1941 Jepang membom Pearl Harbour, pangkalan terbesar Angkatan Laut Amerika di Pasifik dan tentara Jepang menyerbu Asia Tenggara. Oleh karena Belanda adalah sekutu Amerika, maka lebih kurang lima jam setelah Pearl Harbour dibom, Gubernur Jenderal Hindia Belanda menyatakan perang kepada Jepang.<sup>1</sup>

Salah satu faktor yang menarik dari Hindia Belanda (Indonesia) di mata Jepang adalah minyak, khususnya dalam melancarkan perangnya di Asia Pasifik. Oleh sebab itulah Jepang berusaha menguasai daerah ini. Pihak Belanda sudah merasa curiga terhadap tuntutan Jepang untuk kuota ekspor minyak dari Indonesia yang dianggap sebagai langkah awal untuk memperluas wilayah. Apalagi Jepang juga terikat perjanjian dengan Jerman dan Itali, yang saat itu telah melancarkan serangan di Eropa, termasuk penyerangan ke negeri Belanda pada tanggal 10 Mei 1940. Kecurigaan ini bertambah setelah menyaksikan politik ekspansi Jepang, berupa pernyataan akan dibentuknya "*Lingkungan Kesemakmuran Bersama Asia Timur Raya*" yang meliputi Indochina, Thailand, Hindia Belanda, Selandia Baru,

---

<sup>1</sup> Edi S. Ekadjati, dkk, *Sejarah Kabupaten Tangerang* (Tangerang: Pemerintah Kabupaten Tangerang, 2004) p. 137-138

Australia dengan Jepang, dengan China dan Manchukuo sebagai tulang punggungnya. Kecurigaan itu terbukti setelah secara tiba-tiba, pada tanggal 18 Desember 1941, Jepang mengadakan pemboman terhadap Pearl Harbour.<sup>2</sup>

Awal tahun 1942, pasukan Jepang bergerak ke selatan dan menyerang beberapa wilayah Hindia Belanda. Tarakan, Kalimantan Timur pada tanggal 10 Januari 1942 dapat dikuasai tentara Jepang dengan mudah. Kemudian pada tanggal 20 Januari 1942 secara berturut-turut Jepang menduduki kota-kota di Kalimantan yaitu Pontianak, Martapura dan Banjarmasin. Dan pada bulan Februari mereka pun telah menguasai kota Palembang. Dengan jatuhnya daerah-daerah ini maka terbukalah pulau Jawa bagi tentara Jepang. Setelah perang Pasifik berjalan tiga bulan, pada tanggal 1 Maret 1942 tentara Jepang di bawah pimpinan Letnan Jenderal Hitoshi Imamura telah berada di Teluk Banten yang kemudian mengadakan pendaratan di dekat Merak dan di Bojonegara – tempat pendaratan lainnya: Eretan Etan (Indramayu) dan Kranggan (Rembang).<sup>3</sup>

Sementara tentara Jepang menyerang beberapa tempat di luar Pulau Jawa, Panglima Tentara Belanda menjadikan Jawa Barat sebagai

---

<sup>2</sup> Halwany Michrob, *Catatan Masa Lalu Banten* (Serang: Saudara Serang, 2011) p. 224-225

<sup>3</sup> Michrob, *Catatan Masa Lalu Banten...* p. 225

daerah pertahanan utama di Pulau Jawa. Pertimbangannya adalah, Jawa Barat merupakan pusat pemerintahan, gudang perbekalan, tempat bengkel-bengkel senjata dan medannya sangat strategis bagi kepentingan militer. Jawa Barat dibagi menjadi dua daerah pertahanan, dengan batas Sungai Citarum. Daerah sebelah barat sungai itu, termasuk Tangerang menjadi tanggungjawab seorang mayor jenderal, dengan tugas utama mempertahankan daerah Priangan.<sup>4</sup>

Waktu itu Tangerang dipertahankan oleh satu kesatuan militer Belanda. Pada akhir Februari 1942 mereka melakukan persiapan untuk menghadapi segala kemungkinan penyerbuan tentara Jepang yang waktu itu hamper berhasil menguasai Banten. Untuk menjaga kemungkinan buruk yang mungkin terjadi, pasukan Belanda mempersiapkan Desa Pondok Jagung dan Sarakan sebagai tempat penampungan penduduk kota Tangerang yang tidak mempunyai sanak saudara di daerah pedalaman. Disamping mendirikan gubug-gubug darurat, pasukan Belanda juga mendirikan poliklinik, gudang beras dan garam. Sementara itu, dua pasukan tentara Jepang telah mengalahkan armada Sekutu di Laut Jawa menyerbu Jawa Barat tanggal 1 Maret 1942. Pasukan divisi Ke-2 beserta panglima dan staf Tentara Ke-16,

---

<sup>4</sup> Ekadjati, dkk, *Sejarah Kabupaten Tangerang...* p. 139

mendarat di kota kecil Bojonegara daerah Teluk Banten. Pasukan Divisi Ke-38 (Detasemen pimpinan Kolonel Tosyinari Shoji), mendarat di Eretan Wetan (sebelah barat kota Cirebon) dengan tugas utama merebut kota Bandung.<sup>5</sup>

Pendaratan tentara Jepang di daerah Banten diketahui oleh pasukan Belanda di Tangerang. Pada sore hari itu juga pihak Belanda di Tangerang menyembunyikan sirene tanda bahaya dan pengumuman agar penduduk kota Tangerang mengungsi ke daerah pedalaman untuk menghindari pertempuran. Esok harinya (2 Maret 1942) pasukan Belanda menghancurkan jembatan Cisadane untuk menghambat gerak tentara Jepang. Pada hari yang sama satu kolone tentara Jepang yang mendarat di daerah Teluk Banten bergerak ke arah timur melalui Serang-Kragilan-Parigi-Balaraja-Tangerang. Pasukan Jepang sampai di Balaraja tanggal 3 Maret 1942. Selanjutnya tentara Jepang menyerbu dan menduduki Tangerang (3/4 Maret 1942). Sebagian pasukan meneruskan serbuan ke Jakarta.<sup>6</sup>

Selama masa transisi mundurnya tentara Belanda ke Jakarta dan masuknya tentara Jepang, di dalam kota Tangerang terjadi peristiwa perampokan besar-besaran terhadap harta benda milik

---

<sup>5</sup> Ekadjati, dkk, *Sejarah kabupaten Tangerang...* p. 139-140

<sup>6</sup> Ekadjati, dkk, *Sejarah Kabupaten Tangerang...* p. 140

golongan minoritas Cina. Oleh penduduk setempat aksi perampokan disebut penggedoran. Di dalam aksi penggedoran itu bukan hanya harta bendanya saja yang diambil tetapi dibarengi pula pengrusakan terhadap rumah dan barang-barang lainnya.<sup>7</sup>

Setelah pasukan Jepang menduduki Tangerang, di sungai Cisadane dibangun jembatan baru, tidak jauh dari lokasi jembatan yang dihancurkan. Pengerjaannya dilakukan oleh para interniran Belanda, baik sebagai tenaga ahli maupun sebagai tenaga kasar. Dibangun pula kubu-kubu pertahanan di Lengkong, Legok, Curug, dan Jombang, masing-masing dijaga oleh satu peleton tentara. Untuk memulihkan keamanan, diberlakukan peraturan keras bagi masyarakat. Untuk mengurus kongsi Karawaci dan Cilongok, pemerintah militer Jepang di Tangerang mengangkat Raden Mas Kusumo sebagai pemegang kuasa kongsi-kongsi tersebut. Akan tetapi, kongsi Sepatan, Pasar Baru dan Keramat tidak ada pengurusnya.

Ketika Tangerang mulai diduduki oleh pasukan Jepang (3 Maret 1942), pada hari yang sama Detasemen Syoji yang mendarat di Eretan berhasil menduduki Subang dan Kalijati menggempur pertahanan Belanda di Ciater. Tentara Belanda yang menjaga Ciater

---

<sup>7</sup> Sumarda, *Tangerang 1945-1946...* p. 43

tidak mampu menahan serbuan pasukan Jepang. Mereka mundur ke Lembang. Pasukan Jepang terus menyerbu, sehingga mereka menguasai Lembang tanggal 7 Maret 1942, karena tentara Belanda mundur ke Bandung. Dengan demikian, kota Bandung terbuka bagi serangan Jepang.<sup>8</sup>

Jaman pendudukan Jepang yang berlangsung selama setengah tahun, seperti halnya daerah-daerah lain di seluruh Indonesia, merupakan jaman kesengsaraan lahir batin. Kehidupan rakyat sangat menderita. Bahan makanan pokok seperti beras harus diserahkan kepada Jepang sebagai setoran wajib. Untuk mengelabui Jepang, banyak penduduk di daerah pedalaman Tangerang menyimpan berasnya di dalam tanah, dimasukkan ke dalam kasur atau bantal serta tempat-tempat yang dianggap cukup aman dari pemeriksaan Jepang. Bahan-bahan kebutuhan lainnya seperti minyak kelapa, ikan, garam, minyak tanah, gula, tepung, sangat sulit diperoleh. Barang-barang tersebut biasanya disalurkan oleh *Kumiai* (koperasi Jepang) tetapi sangat terbatas sekali.

Kegiatan peribadatan maupun pesantren-pesantren yang di daerah Tangerang tetap diperbolehkan berjalan seperti biasa tetapi

---

<sup>8</sup> Ekadjati, dkk, *Sejarah Kabupaten Tangerang...* p. 141

mendpaat pengawasan yang ketat dari aparatur pemerintahan Jepang. Dua minggu sekali pimpinan pengajian maupun pimpinan pesantren harus melapor kepada Soncho (camat) setempat tentang kegiatan-kegiatan yag ada di tempat pengajian atau pesantrennya selama dua minggu itu. Guru ngaji dan Kiyai dilarang keras memberikan pelajaran tarekat maupun pelajaran kebatinan kepada para santri atau jawara.<sup>9</sup>

### **B. Peranan KH. Ahmad Khaerun Pada Masa Revolusi di Tangerang Tahun 1945-1946**

Pada tanggal 19 September 1945 dengan dipelopori oleh barisan Benteng Merah dibawah pimpinan Deos rakyat Tangerang berkumpul dan bergerak menuju Jakarta untuk turut menghadiri rapat raksasa di Lapangan Ikada (kini lapangan Monas) Jakarta. Berbagai sarana transportasi dikerahkan untuk mengangkut massa rakyat itu, bahkan ada yang sampai ke Jakarta dengan berjalan kaki. Berduyun-duyunnya rakyat tidak hanya menunjukkan dukungan mereka kepada negara Republik Indonesia merdeka yang berarti bangsa Indonesia telah merdeka dan siap mempertahankan kemerdekaannya, tetapi juga menunjukkan kekuatan dan tekad rakyat Jakarta dan sekitarnya dan seluruh rakyat Indonesia pada umumnya. Di pihak lain tentara Jepang

---

<sup>9</sup> Sumarda, *Tangerang 1945-1946...* p. 49

bersiap-siap menghadapi berbagai kemungkinan yang akan terjadi dengan kendaraan lapis bajadan persenjataan lengkap. Di Lapangan Ikada berkembang ke arah situasi yang semakin memanas, hanya menunggu satu pemicu untuk terjadi ledakan kekerasan. Pada situasi demikian Sukarno akhirnya hadir dan berbicara kepada mereka. Ia hanya mengucapkan pidato singkat yang intinya mengulang seruan untuk tetap tenang dan tertib serta meminta mereka pulang dengan tenang. Rakyat mematuhi seruan tersebut. Dengan tenang rakyat bubar, ,meskipun dengan perasaan dongkol.<sup>10</sup>

Rakyat Tangerang yang kembali menghadiri rapat raksa di Lapangan Ikada tampak lebih bersemangat. Sambil berbondong-bondong kembali ke tempat asal mereka, di sepanjang jalan di Tangerang mereka berulang-ulang meneriakan pekik “merdeka” sambil mengepalkan tangan. Sebuah insiden kecil terjadi, ketika serombongan rakyat dihadang oleh 15 orang polisi Curug yang sedang patrol di Bencong (sekarang lokasi Perumnas Tangerang). Ketegangan terjadi setelah polisi melepaskan tembakan ke udara. Rombongan rakyat segera mengeroyok polisi-polisi itu.<sup>11</sup>

Permintaan agar rakyat tertib dan tenang pada kenyataannya hanya dapat dilaksanakan di Jakarta, tetapi tidak demikian di luar

---

<sup>10</sup> Ekadjati, dkk, *Sejarah Kabupaten Tangerang..* p. 167.

<sup>11</sup> Ekadjati, dkk. *Sejarah Kabupaten Tangerang..* p. 168

Jakarta. Meskipun dalam hal pengalihan kekuasaan dari Jepang relative berlangsung damai, bahkan ada kesan kerelaan, tetapi tidak demikian halnya terhadap aparat pemerintah pribumi. Rakyat melihat bahwa pegawai pribumi, dalam hal ini pamong praja, merupakan kaki tangan penguasa kolonial yang menghambat perjuangan kemerdekaan. Oleh karena itu, pamong praja harus disingkirkan, akibatnya tindak kekerasan terhadap pamong praja tidak dapat dihindarkan.<sup>12</sup>

Ungkapan pereraan benci tidak dapat dilepaskan dari situasi dan kondisi daerah itu di masa lalu. Sebelum pendudukan Jepang, daerah-daerah itu merupakan wilayah tanah-tanah partikelir yang dikuasai tuan tanah. Kebijakan ekonomi Belanda telah mengakibatkan pemerasan secara besar-besaran terhadap penduduk pribumi Indonesia, terutama di daerah-daerah partikelir. Melihat situasi yang membahayakan negara dan dalam upaya mempertahankan kemerdekaan, pemerintah RI memandang perlu untuk dibentuk angkatan perang. Untuk keperluan itu dibentuk Panitia Kecil yang dipimpin oleh Otto Iskandar Dinata. Panitia Kecil ini mengajukan usul agar lembaga-lembaga ketentaraan bentukan Jepang dibubarkan dan sebagai gantinya dibentuk tentara kebangsaan.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Ekadjati, dkk. *Sejarah Kabupaten Tangerang..* p. 168

<sup>13</sup> Ekadjati, dkk, *Sejarah Kabupaten Tangerang...* p. 169

Presiden Sukarno tertarik kepada usulan Otto Iskandar Dinata itu. Selanjutnya, Presiden Sukarno menunjuk Abdul kadir selaku ketua yang menangani pembentuka tentara dengan dibantu oleh Kasman Singodimejondan Otto Iskandar Dinata sendiri. Akan tetapi, usulan untuk membentuk tentara seperti yang diusulkan oleh Otto ternyata berbeda dengan keputusan presiden Sukarno yang di dalam pidatonya pada 23 Agustus 1945 menyatakan: "...Prajurit-prajuri bekas Peta, Heiho dan pelaut beserta pemuda lainnya untuk sementara waktu masuklah dan bekerjalah dalam Badan Keamanan Rakyat". Adapun tugas yang didibebankan kepada BKR hanya terbatas pada usaha-usaha untuk menjaga keamanan umum di daerah-daerah dan statusnya berada di bawah koordinasi KNI daerah, pimpinan pusat BKR tidak ada.

Keputusan Presiden Sukarno menimbulkan dua macam reaksi dari kalangan pemuda. Pertama, reaksi dari kalangan pemuda yang pernah memperoleh latihan dan pengalaman militer pada zaman kolonial Belanda dan pendudukan Jepang yang serentak memasuki BKR di wilayahnya masing-masing serta memanfaatkan badan itu sebagai wadah perjuangan selanjutnya. Kedua, reaksi dari kelompok pemuda yang pada masa pendudukan Jepang membentuk kelompok-kelompok politik. Kelompok pemuda ini tidak puas dengan dibentuknya BKR oleh pemerintah. Karena itu, mereka membentuk

badan-badan perjuangan yang berada di bawah naungan Komite van Aksi yang dipimpin oleh Adam Malik, Sukarni, Maruto Nitimiharjo, dan lain-lain. Kelompok pemuda ini antar lain membentuk API (Angkatan Pemuda Indonesia), BARA (Barisan Rakyat Indonesia), BBI (Barisan Buruh Indonesia), Barisan Banteng, KRIS (Kebaktian Rakyat Indonesia Sulawesi), PIM (Pemuda Indonesia Maluku), Hisbullah dan Sabilillah.<sup>14</sup>

### **C. Strategi Perjuangan KH. Ahmad Khaerun Pada Masa Revolusi di Tangerang Tahun 1945-1946**

Sejak awal Oktober 1945 di daerah pedesaan Tangerang mulai timbul pergolakan berupa aksi kekerasan terhadap para pejabat pamong praja, orang-orang Cina, dan orang-orang kaya. Dipelopori oleh jawara setempat, rakyat beramai-ramai menurunkan pejabat yang dianggap mereka akan menentang atau menghalangi kemerdekaan. Di mata rakyat, pejabat pedesaan dianggap memiliki sikap yang lebih mendukung kepada penjajah. Tidak menutup kemungkinan bahwa aksi ini dilandasi oleh rasa dendam yang telah lama membara di hati rakyat akibat perilaku pejabat yang dianggap tidak adil terhadap rakyat pada masa lalu. Aksi pendaulatan ini sering dilakukan dengan kekerasan. Salah satu korbannya adalah Asisten Wedana Sepatan bernama

---

<sup>14</sup>Ekadjati, dkk, *Sejarah Kabupaten Tangerang...* p. 170

Tubagus Kurnia yang dibunuh saat terjadi pendaulatan atas dirinya. Sementara Wedana Kresek Iskandar berhasil meloloskan diri. Di Kampung Parungkuda, Haji Muhur disertai 40 orang bersenjata memaksa lurah setempat untuk turun dari jabatannya dan digantikan oleh Laut bin Pitak. Aksi ini kemudian menjurus kepada tindak kekerasan yang bersifat rasial yang ditujukan kepada orang Cina yang dianggap sebagai kapitalis-kapitalis pemerias rakyat sehingga harus disingkirkan. Akibatnya banyak rumah orang Cina dibakar, harta bendanya dijarah, dan tidak jarang akhirnay mereka dibunuh.<sup>15</sup>

Menghadapi situasi tersebut pada 6 Oktober 1945 KNID Tangerang mengadakan rapat darurat di pendopo kabupaten. Rapat yang dihadiri semua pejabat KNID, anggota Fonds Kemerdekaan, ketua BKR, Ketua Barisan Pelopor, dan Ketua Lalu Lintas Sosial itu membahas tentang kasus Sepatan dan Kresek. Sementara Kepala kantor Jawa Pos menyampaikan surat-surat dari masyarakat yang berisi kritikan atas kejadian-kejadian perampokan dan pembakaran rumah orang-orang Cina di Sepatan, Kedaung, Kresek dan Kronjo. Rapat yang dipimpin Ketua KNID Tangerang R.M. Kusumo akhirnya menyimpulkan bahwa kekacauan itu terjadi akibat tidak berfungsinya Bupati sebagai kepala daerah yang saat itu dijabat oleh Agus

---

<sup>15</sup> Ekadjati, dkk, *Sejarah Kabupaten Tangerang...* p. 174

Padmanegara. Kemudian diusulkan agar KH. Ahmad Khaerun sebagai bupati. Usulan ini dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa KH. Ahmad Khaerun mempunyai pengaruh kuat di kalangan masyarakat, terutama di kalangan jawara, sehingga ia diharapkan akan mampu mengendalikan keadaan di wilayah Tangerang yang dinilai sedang mengalami kekacauan<sup>16</sup>

Rapat pleno yang waktu itu dipimpin oleh Ketua KNID Tangerang, R. M. Kusumo merupakan rapat pleno pertama dan terakhir yang memutuskan agar KH. Ahmad Khaerun dijadikan pemimpin revolusi di Tangerang. Keesokan harinya R.M. Kusumo bersama-sama dengan Sutedjo mengadakan perundingan dengan KH. Ahmad Khaerun di Kampung Sangiang. Tawaran KNID tersebut diterima oleh KH. Ahmad Khaerun. Untuk kepentingan itu sekitar tanggal 9 Oktober 1945, KH. Ahmad Khaerun bersama dengan keluarga dan pengikutnya diboyong oleh R.M Kusumo ke Karawaci dan ditempatkan di gedung kongsi milik Oey Kiat Tjin.<sup>17</sup>

Sementara itu, untuk menjaga diri dan keluarganya, Bupati Agus Padmanegara mengumpulkan jawara-jawara sekitar Batuceper dan Rawa Bokor dibawah pimpinan Haji Taung guna menjaga kediamannya. Tindakan itu mendapat reaksi negatif dari para tokoh

---

<sup>16</sup> Ekadjati, dkk, *Sejarah Kabupaten Tangerang...* p. 175

<sup>17</sup> Sumarda, *Tangerang 1945-1946...* p. 66

masyarakat Tangerang, sehingga pada 16 Oktober 1945 Sumo Atmojo mengundang beberapa tokoh masyarakat ke rumahnya. Undangan itu dipenuhi KH. Ahmad Khaerun, Sutedjo, R.M. Kusumo, Deos, Syekh Abdullah, dan Suwono. Dalam pertemuan itu dibicarakan kasus jawara yang dikumpulkan Bupati Agus Padmanegara. Akhirnya mereka sepakat dan memutuskan akan melakukan pendaulatan secara damai atas diri Bupati Agus Padmanegara. Dalam hal ini KH. Ahmad Khaerun, Deos, dan Syekh Abdullah bertugas menggerakkan massa rakyat dari Karawaci dan Sepatan menuju kediaman Bupati Agus Padmanegara, sedangkan pengambilalihan kekuasaan secara formal direncanakan dilakukan oleh Sutedjo.<sup>18</sup>

Tujuan KNID merangkul KH. Ahmad Khaerun kemungkinan dengan perhitungan agar Kelompok Sangiang tidak bergabung dengan kelompok Benteng Merah. Karena bila hal tersebut sampai terjadi akan dapat membahayakan posisi Kelompok Birokrat. Begitu pula dengan menempatkan KH. Ahmad Khaerun dan pengikutnya di Kongsi Karawaci, KNID dapat memonitor kegiatan kelompok tersebut. Setelah KH. Ahmad Khaerun pindah ke Gendung Kongsi Karawaci, praktek ilmu kebatinan tetap dibuka seperti biasa dan malah semakin ramai

---

<sup>18</sup> Ekadjati, dkk, *Sejarah kabupaten Tangerang 1945-1946...* p. 175

dikunjungi oleh para tamu. Kelompok Barisan Benteng yang melihat Kelompok Sangiang berhasil dirangkul oleh Kelompok Birokrat lalu menuduh KH. Ahmad Khaerun sudah diperalat oleh Kelompok Birokrat. Penghinaan tersebut tidak diterima oleh Kelompok Sangiang dan hampir saja terjadi bentrokan antara kedua kelompok tersebut. Atas jasa Sumo Atmojo, kelompok yang bertikai itu akhirnya berhasil didamaikan.<sup>19</sup>

Dalam kenyataannya ledakan situasi tidak dapat dicegah lagi dan mendorong terjadinya aksi daulat dan penyerobotan pemerintahan Kabupaten Tangerang. Pada tanggal 18 Oktober 1945, di Curug, sisi barat daya Tangerang, KH. Ahmad Khaerun yang menamakan dirinya “Bapak Rakyat” mengkoordinasikan pemberontakan rakyat dan berhasil menurunkan sejumlah aparat formal pemerintahan. Di depan massa yang mendatangi kediaman Bupati Tangerang Agus Padmanegara, KH. Ahmad Khaerun berupaya menemui bupati yang rencananya akan dipaksa untuk menandatangani surat penyerahan kekuasaan kepada rakyat, tetapi pada waktu itu Bupati Agus Padmanegara tidak sedang berada di kediamannya. Dalam suasana demikian terjadilah penyerobotan kekuasaan (aksi daulat). Dalam aksi

---

<sup>19</sup> Sumarda, dkk, *Tangerang 1945-1946...* p. 66-67

daulat ini semua pamongpraja sampai ke tingkat lurah diberhentikan. Aparat polisi pun dibubarkan.<sup>20</sup>

Pengambilalihan jabatan bupati oleh KH. Ahmad Khaerun disebabkan oleh beberapa faktor khusus dan faktor umum. Yang tergolong faktor khusus adalah ambisi pribadi KH. Ahmad Khaerun untuk berkuasa menjadi bupati Tangerang yang dilandasi oleh “ideologi merah” (PKI) yang telah mempengaruhi dan dianutnya sejak dulu. Adapun faktor umum adalah (1) rakyat tidak mempercayai lagi para pejabat yang pada jaman penjajahan telah bertindak sebagai kaki tangan penjajah dan turut aktif menindas rakyat, (2) adanya berbagai macam badan bersenjata partikelir sehingga aliran-aliran politik dapat mempergunakan pasukan-pasukan tersebut untuk tujuan politiknya, dan (3) tidak adanya kepemimpinan yang tegas dari pusat berdampak pergolakan dibiarkan terus berlangsung dari daerah satu ke daerah lainnya<sup>21</sup>

Atas dasar faktor-faktor di atas KH. Ahmad Khaerun menggerakkan sekelompok rakyat yang telah berada di bawah pengaruhnya untuk mengadakan tindakan yang menuntut anggapan mereka benar. Geraka ini mencapai puncak dengan terjadinya peristiwa “Sepatan” yang mengakibatkan seorang camat RI menjadi korban

---

<sup>20</sup> Ekadjati, dkk, *Sejarah Kabupaten Tangerang...* p. 176

<sup>21</sup> Ekadjati, dkk, *Sejarah Kabupaten Tangerang...* p. 176

pembunuhan mereka. Mendengar terjadinya peristiwa tersebut, Residen Jakarta Sewaka segera mengadakan kunjungan ke Tangerang. Dari hasil peninjauan itu, Residen Sewaka memperoleh kesan bahwa tampaknya semua jawatan telah dikuasai oleh komplotan KH. Ahmad Khaerun, kecuali sekelompok TKR (Tentara Keamanan Rakyat, sebagai lanjutan dari BKR) yang tetap setia kepada pemerintah RI. Komandan TKR Singgih menyarankan kepada Residen Sewaka agar tidak dilakukan tindakan keras terlebih dahulu, bahkan menyarankan agar masalah tersebut jangan langsung diributkan, tetapi perlu dilihat perkembangannya. Saran tersebut didasarkan atas pertimbangan berikut. *Pertama*, seluruh pegawai di Tangerang dari tingkat kabupaten sampai tingkat kecamatan, demikian juga pegawai-pegawai jawatan lainnya masih kompak dan pada hakekatnya mereka tetap setia kepada pemerintah RI sehingga kepentingan rakyat masih dapat terjamin. *Kedua*, pemerintah pusat (Keresidenan Jakarta) masih banyak menghadapi hal-hal lain yang perlu segera diatasi. *Ketiga*, tindakan keras kepada pelaku peristiwa Tangerang saat itu hanya akan menguntungkan pihak ketiga (Belanda). Residen Sewaka menyetujui saran Komando TKR itu dan meminta agar ia terus melaporkan perkembangan peristiwa Tangerang kepada Residen.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Ekadjati, dkk, *Sejarah Kabupaten Tangerang...* p. 177

Tiga hari setelah melakukan kudeta, pada 21 Oktober 1945, bertepatan dengan berdirinya kembali PKI, KH. Ahmad Khaerun mengadakan pertemuan dengan ketua dan wakil ketua KNID Kabupaten Tangerang di rumahnya. Pertemuan itu dipimpin oleh Sumo serta dihadiri Kusumo dan Suryosaputro sebagai wakil KNID Tangerang. Dalam pertemuan tersebut dinyatakan bahwa sejak itu pemerintahan di Kabupaten Tangerang dipegang dan dijalankan oleh suatu badan bernama Badan Diktarium Dewan Pusat yang dipimpin oleh empat serangkai, yaitu KH. Ahmad Khaerun, Sumo, Suwono, dan Abas. Badan ini membawahi tiga dewan, yaitu:

1. Dewan Tata Usaha termasuk pamongpraja dan segala urusan yang berhubungan dengankepamongprajaan
2. Dewan Ekonomi, termasuk segala sesuatu yang berhubungan denganperekonomian.
3. Dewan Pertahanan, meliputi
  - a. Keamanan (sebagai pengganti kepolisian)
  - b. Lalu-lintas, dikepalai oleh Moh. Hassan
  - c. Kelaskaran, dikepalai oleh Syekh Abdullah (seorang peranakan Arab) merangkap sebagai panglima “Barisan Berani Mati”

Adapun kawedanan, kecamatan dan kelurahannya, sebutannya diganti menjadi Daerah I, Daerah II, dan Daerah III. Daerah I (kewadanan) dikepalai oleh seorang wedana selaku Ketua Daerah I. daerah I (kecamatan) dikepalai oleh seorang wedana selaku Ketua Daerah II. Daerah III (kelurahan) dikepalai oleh seorang wedana selaku Ketua Daerah III. Sedangkan KNID Kabupaten Tangerang dibubarkan karena dianggap tidak berdasarkan kedaukatan rakyat. Hal terpenting dalam rapat tersebut adalah diperkuatnya keputusan yang menyatakan putus hubungan dengan pemerintahan di Jakarta.

Dengan berdirinya pemerintahan baru yang berbentuk Dewan Rakyat itu, maka Tangerang telah berada pada pemerintahan yang beraliran komunis. Pemutusan hubungan Jakarta menunjukkan sifat radikal dari ideologi yang menjiawai pemerintahan rakyat. Sejak aksi pendaulatan pad 18 Oktober keadaan Tangerang belum sepenuhnya pulih. Kekacauan masih terjadi termasuk di dalam kota sendiri. Naiknya KH. Ahmad Khaerun sebagai Bupati Tangerang atau dalam hal ini Pemerintah Dewan Rakyat, juga tidak berhasil menghentikan kekacauan yang terus terjadi. Dalam perjalanannya ternyata Pemerintah Dewan rakyat di bawah KH. Ahmad Khaerun tidak berhasil menciptakan ketentraman dan ketenangan.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Ekadjati, dkk, *Sejarah Kabupaten Tangerang...* p. 178

Untuk membantu kelancaran tugas Ketua dewan diangkat beberapa orang pembantu utama yaitu Haji Boim Ibrohim dan Haji Achmad Syadeli sebagai sekretaris serta Haji Romeli sebagai ajudan. Keputusan rapat lainnya diantaranya menyangkut tentang konsolidasi Pemerintahan Sipil yang ada di Curug dan rencana penyerbuan benteng Jepang yang ada di Kampung Legok. Tanggal 22 Oktober 1945 semua laskar rakyat yang dipersiapkan untuk menyerbu Curug dan Legok sudah bergerak. Usman dan Adjam yang masing-masing memimpin laskar Pangodokan dan Curug memperoleh tugas untuk menghadapi pemerintahan sipil di Curug yang dipertahankan oleh Camat Mohammad Hapid dan Kepala Polisinya, yaitu Ali Djaja. Sedang Haji Entong, pimpinan laskar Cikoneng, dan Hamim, pimpinan laskar Cijantra, memperoleh tugas untuk bersama-sama menyerbu tentara Jepang yang ada di Legok. Penyerbuan ke Curug berhasil dengan baik karena semua pegawai Kecamatan maupun Kepolisian sudah menyerah terlebih dahulu, kecuali Camat Mohammad Hapid yang melarikan diri ke Tangerang. Sedang laskar rakyat yang menyerbu benteng Jepang di Legok hanya mendapatkan barang-barang bekas karena beberapa jam sebelumnya tentara Jepang sudah meninggalkan Legok menuju Bogor.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Sumarda, *Tangerang 1945-1946...* p. 74

Laskar rakyat kelompok KH. Ahmad Khaerun yang bernama Laskar Hitam dan Pasukan Berani Mati pimpinan Syekh Abdullah tidak dapat menegakkan keamanan dan ketertiban. Sebaliknya, laskar ini tidak sewenang-wenang dan merugikan orang lain. Mereka melakukan perampokan, penggedoran, dan berperilaku “berlebihan” yang secara psikologis mengganggu serta meresahkan masyarakat. Orang-orang Cina adalah sasaran perampokan mereka. Toko-toko dan rumah-rumah orang-orang Cina digedor serta barang-barangnya dirampas. Terhadap perilaku Laskar Hitam itu pemerintahan KH. Ahmad Khaerun tampak tidak berdaya dan terkesan membiarkan perilaku yang mengganggu masyarakat itu terus berlangsung. Pemerintahan KH. Ahmad Khaerun yang menyatakan diri atas dasar kedaulatan rakyat akhirnya berubah menajdi kedaulatan kelompok. Pemutusan hubungan dengan Jakarta membuktikan bahwa Pemerintahan Tangerang ini telah menentang Indonesia dan melakukan tindakan pembangkangan. Laskar Hitam sering melakukan penindasan dan terror terhadap yang memihak Indonesia. Kenyataan menunjukkan bahwa pada masa kekuasaan Dewan Rakyat ini justru rakyat hidup menderita dalam penindasan dan ketakutan akibat penindasan anarkisme “bapak rakyat”<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Ekadjati, dkk, *Sejarah Kabupaten Tangerang...* p. 179

Antara bulan November dan Desember 1945, orang-orang Cina yang bertempat tinggal di daerah Sepata, Mauk, Kronjo dan Kresek banyak yang mengungsi ke kota Tangerang dan Jakarta karena khawatir terhadap tindakan yang dilakukan kelompok tersebut. Di samping aksi-aksi pengacauan dan tindakan tercela lainnya, kelompok ini juga paling banyak dianggap melakukan pembunuhan terhadap orang-orang yang dituduh mata-mata Nica atau Belanda.<sup>26</sup>

Setelah KH. Ahmad Khaerun berkuasa selama sekitar tiga bulan, pada 14 Januari 1946 TKR di bawah pimpinan Letkol Singih mengambil-alih kekuasaan dan mengembalikan Tangerang ke tangan Republik Indonesia. Pengambilalihan kekuasaan ini berjalan lancar tanpa pertumpahan darah. KH. Ahmad Khaerun dan orang-orang dekatnya, yaitu Alibasyah, Abbas, Syekh Abdullah, Haji Muhur dan Haji Saalan, ditangkap serta di bawa ke Selabintana, Sukabumi untuk dieksekusi.<sup>27</sup>

Untuk mengisi kekosongan aparat pemerintahan yang ada di Tangerang akibat ditahannya para pejabat yang jadi pengikut KH. Ahmad Khaerun, pihak Resimen IV membentuk Badan Pembantu Aparat Pemerintahan (Bapera) yang anggotanya terdiri dari bekas Pangreh Praja yang didaulat oleh Pemerintahan Dewan Tangerang

---

<sup>26</sup> Sumarda, *Tangerang 1945-1946*.. p. 95

<sup>27</sup> Ekadjati, dkk, *Sejarah Kabupaten Tangerang*... p. 180

ditambah dengan perwira-perwira Resimen IV dan siswa-siswa Militer Akademi.<sup>28</sup>

Pada tanggal 16 Januari 1946, Komandan TKR Tangerang mengadakan rapat untuk membicarakan konsolidasi pemerintahan. Rapat dihadiri oleh wakil-wakil dari TKR dan tokoh-tokoh masyarakat, termasuk beberapa orang pengikut KH. Ahmad Khaerun. Pertemuan tersebut memutuskan bahwa untuk menyesuaikan pemerintahan dalam wujud kompromi disusun struktur dan personalia pemerintahan di Kabupaten Tangerang yang terdiri dari 18 orang. Penunjukan beberapa orang tokoh komplotan KH. Ahmad Khaerun untuk duduk dalam panitia itu merupakan suatu taktik untuk melemahkan agar mereka tidak merasa buronan, padahal mereka sudah masuk perangkap. Hal itu terbukti dengan ditangkapnya beberapa tokoh komplotan KH. Ahmad Khaerun, setelah mereka menduduki jabatan pemerintahan Kabupaten Tangerang.<sup>29</sup>

Pada tanggal 20 Januari 1946 panitia tersebut mulai bersidang. Kira-kira seminggu kemudian tersusun aparat pemerintahan Kabupaten Tangerang sebagai berikut:

Bupati : KH. Ahmad Khaerun

Patih : R. Akhyad Pena

---

<sup>28</sup> Sumarda, dkk, *Tangerang 1945-1946...* p. 100

<sup>29</sup> Ekadjati, dkk, *Sejarah Kabupaten Tangerang...* p. 180-181

Sekretaris	: R. Sutakaria
Kepala Agama	: H. Moh. Junaedi
Kepala Keuangan	: R. Abdulhamid
Kepala Perguruan	: Rakhmat
Kepala Sosial	: R. Mohammad Hassan
Kepala Ekonomi	: (tidak tercatat)
Kepala Kesehatan	: dr. Suparno
Kepala Urusan Pegawai	: R. Yakhya
Wedana Tangerang	: R. Mukhtar Brata
Wedana Curug	: R. Dodo Suharja
Wedana Balaraja	: H. Alibasyah
Wedana Mauk	: H. Ardani
Badan Penasehat	
Ketua	: Abbas
Wakil Ketua	: Mayor Dan Yahya
Sekretaris	: Mujitaba
Anggota	: Syekh Abdullah, H. Muhur, H. Arsudin, H. Arsyad.

Belum lama pemerintahan berjalan, beberapa orang pejabat yang terlibat dalam peristiwa Tangerang, yaitu KH. Ahmad Khaerun, H. Alibasyah, Syekh Abdullah, H. Muhur, H. Arsyad, dan H. Saalan

ditangkap dan dibawa ke Selabintana, Sukabumi. Dengan ditangkapnya beberapa orang pejabat tersebut di atas, maka untuk sementara waktu pemerintahan dipegang oleh Patih Akhyad Pena. Berhubung dengan kesatuan polisi yang telah dibentuk cerai-berai akibat terjadinya pertempuran dengan komplotan Ce' Mamat, maka Patih Akhyad Pena kemudian membentuk sebuah panitia penyusunan kembali kepolisian Kabupaten Tangerang yang terdiri dari lima orang, yaitu Sutejo, Winoto (Kepala Jawatan Kabupaten Tangerang) Dr. J. Leimena (Kepala Rumah Sakit Tangerang), R. Sutakaria (Jaksa Tangerang), R. Moh. Hassan alias Acang. Panitia ini berhasil membentuk sebuah Kepolisian Kabupaten Tangerang.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Ekadjati, dkk. *Sejarah Kabupaten Tangerang...* p. 181-182